



BUPATI PURWAKARTA

Purwakarta, 14 Juni 2021

Kepada :

Nomor : 130/1913/059
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Penyederhanaan
Struktur Organisasi dan
Penyetaraan Jabatan

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia
melalui :
Gubernur Jawa Barat
Di -
Bandung

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 3011/OT.03/Org, tanggal 4 Juni 2021, hal : Penyampaian Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, kami sampaikan berkas sebagai berikut :

1. Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Usulan Penyetaraan Jabatan hasil identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi Pengawas kedalam Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian atas perhatian dan perkenannya dihaturkan terima kasih.



LAMPIRAN I SURAT BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :

**MATRIK IDENTIFIKASI JABATAN ADMINISTRASI/PENGAWAS YANG DIALIHKAN KE
 JAB.FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PURWAKARTA**

**A. REKAPITULASI JABATAN PENGAWAS YANG DIALIHKAN KEJABATAN FUNGSIONAL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PURWAKARTA**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TOTAL JABATAN	JUMLAH JABATAN YANG DIALIHKAN	JUMLAH YANG DIKECUALIKAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	27	21	6
2.	SEKRETARIAT DPRD	12	6	6
3.	INSPEKTORAT DAERAH	3	2	1
4.	DINAS PENDIDIKAN	15	6	9
5.	DINAS KESEHATAN	39	13	26
6.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	14	1
7.	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	13	9	4
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17	13	4
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	11	9	2
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	9	2
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	9	8
12.	DINAS PERHUBUNGAN	13	3	10
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	24	13	11
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15	14	1
15.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16	14	2
16.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	21	14	7
17.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	27	14	13
18.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18	17	1
19.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	4	7
20.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11	4	7
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	9	2
22.	KECAMATAN (ada : 17 Kecamatan di Kab.Purwakarta)	119	0	119
	KELURAHAN (ada : 9)	45	0	45
23.	RSUD BAYU ASIH	7	7	0
24.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15	14	1
25.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	0	3
26.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN	21	9	12
27.	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	17	12	5
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	0	11
29.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	21	3	18
30.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16	11	5
	JUMLAH	622	372	250

LAMPIRAN I SURAT BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :

**MATRIK IDENTIFIKASI JABATAN ADMINISTRASI/PENGAWAS YANG DIALIHKAN KE
 JAB.FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PURWAKARTA**

**A. REKAPITULASI JABATAN PENGAWAS YANG DIALIHKAN KEJABATAN FUNGSIONAL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PURWAKARTA**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TOTAL JABATAN	JUMLAH JABATAN YANG DIALIHKAN	JUMLAH YANG DIKECUALIKAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	27	21	6
2.	SEKRETARIAT DPRD	12	6	6
3.	INSPEKTORAT DAERAH	3	2	1
4.	DINAS PENDIDIKAN	15	6	9
5.	DINAS KESEHATAN	39	13	26
6.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	14	1
7.	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	13	9	4
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17	13	4
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	9	2
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	9	2
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	9	8
12.	DINAS PERHUBUNGAN	13	3	10
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	24	13	11
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15	14	1
15.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16	14	2
16.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	21	14	7
17.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	27	14	13
18.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18	17	1
19.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	4	7
20.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11	4	7
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	9	2
22.	KECAMATAN (ada : 17 Kecamatan di Kab.Purwakarta)	119	0	119
	KELURAHAN (ada : 9)	45	0	45
23.	RSUD BAYU ASIH	7	7	0
24.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15	14	1
25.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	0	3
26.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN	21	9	12
27.	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	17	12	5
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	0	11
29.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	21	3	18
30.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16	11	5
	JUMLAH	622	273	349

B. NOMENKLATUR JABATAN PENGAWAS YANG DIALIHKAN KE JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PURWAKARTA

KETERANGAN WARNA KOLOM

ORANYE UNTUK PERANGKAT DAERAH

KUNING UNTUK NOMENKLATUR JABATAN YANG DIKECUALIKAN

PUTIH UNTUK NOMENKLATUR JABATAN YANG DIALIHKAN KE FUNGSIONAL

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	SEKRETARIAT DAERAH, terdiri atas :		
	ASDA I		
	BAGIAN PEMERINTAHAN		Seluruh Subbag. jadi JF
1	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ANALIS KEBIJAKAN	
2	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	ANALIS KEBIJAKAN	
3	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		Seluruh Subbag. jadi JF
4	KEPALA SUBBAGIAN BINA MENTAL DAN SPIRITUAL	ANALIS KEBIJAKAN	
5	KEPALA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	ANALIS KEBIJAKAN	
6	KEPALA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	ANALIS KEBIJAKAN	
	BAGIAN HUKUM		Seluruh Subbag. jadi JF
7	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
8	KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM	ANALIS HUKUM	
9	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	ANALIS KEBIJAKAN	
	ASDA II		
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		Seluruh Subbag. jadi JF
10	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	ANALIS KEBIJAKAN	
11	KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS KEBIJAKAN	
12	KEPALA SUBBAGIAN PEREKONOMIAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN		Seluruh Subbag. jadi JF
13	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	ANALIS KEBIJAKAN	
14	KEPALA SUBBAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM	ANALIS KEBIJAKAN	
15	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Tetap
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA		
17	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		
18	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	ASDA III		
	BAGIAN UMUM		Seluruh Subbag. jadi JF
19	KEPALA SUBBAGIAN TATAUSAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	ANALIS SDM APARATUR	
20	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	ANALIS KEBIJAKAN	
21	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BAGIAN ORGANISASI		Seluruh Subbag. jadi JF
22	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	ANALIS KEBIJAKAN	
23	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANALIS KEBIJAKAN	
24	KEPALA SUBBAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANALIS KEBIJAKAN	
	BAGIAN PROTOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		tetap
25	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL		
26	KEPALA SUBBAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
27	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN		
	SEKRETARIAT DPRD		
	BAGIAN UMUM		Tetap
28	KEPALA SUBBAGIAN TATAUSAHA DAN KEPEGAWAIAN		
29	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA		
30	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN		
	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		Seluruh Subbag. jadi JF
31	KEPALA SUBBAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
32	KEPALA SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	PERISALAH LEGISLATIF	
33	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI	PRANATA HUMAS	
	BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN		Tetap
34	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		
35	KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN		
36	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN		
	BAGIAN FASILITASI, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		Seluruh Subbag. jadi JF
37	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	ANALIS KEBIJAKAN	
38	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	ANALIS KEBIJAKAN	
39	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA DAN ASPIRASI	ANALIS KEBIJAKAN	
	INSPEKTORAT DAERAH		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 1 Subbag</i>
43	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN TUGAS PEMBANTUAN	PERENCANA	
44	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
45	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
46	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR		
47	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR		
48	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PENDIDIKAN DASAR	WIDYAPRADA	
	BIDANG BINA SARANA DAN PRASARANA		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
49	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR		
50	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
51	KEPALA SEKSI SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	WIDYAPRADA	
	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAAN		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
52	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	ANALIS SDM APARATUR	
53	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR		
54	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
55	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
56	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	WIDYAPRADA	
57	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL		
	DINAS KESEHATAN		
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 2 Subbag</i>
58	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	PERENCANA	
59	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, AKUNTING DAN ASET		
60	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM DAN HUKUM		
	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
61	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
62	KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
63	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
64	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	DOKTER	
65	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	DOKTER	
66	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
67	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
68	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
69	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
70	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	APOTEKER	
71	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
72	KEPALA SEKSI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) :		
73	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan (Kelas A)		
74	Subbag. TU UPTD Laboratorium Kesehatan		
75	Kepala UPTD Perbekalan Kesehatan (Kelas A)		
76	Subbag. TU UPTD Perbekalan Kesehatan		

*PUSKESMAS Sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional merupakan penyebutan baru berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (vide: Pasal 63, PP 72/2019), sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Di Lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta (vide : Pasal 2 ayat (4), "Pada Usulan Pemerintah di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat : 1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BAYU ASIH, sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional; dan 2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional yang memberikan

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
77	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS MUNJULJAYA		
78	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS MARACANG		
79	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS MULYAMEKAR		
80	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS JATILUHUR		
81	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS CAMPAKA		
82	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS BUNGURSARI		
83	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS CIBATU		
84	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS PASAWAHAN		
85	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS PONDOKSALAM		
86	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS WANAYASA		
87	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS KIARAPEDES		
88	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS SUKATANI		
89	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS DARANGDAN		
90	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS BOJONG		
91	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS PLERED		
92	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS TEGALWARU		
93	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS MANIS		
94	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS SUKASARI		
95	SUBBAG. TU UPTD PUSKESMAS (JS)		
	UPTD PUSKESMAS KONCARA		
96	Subbag. TU UPTD Puskesmas (JS)		
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 2 Subbag (tetap)
97	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
98	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG BINA PROGRAM DAN PENGENDALIAN		Seluruh seksi jadi JF
99	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, DATA DAN INFORMASI	ANALIS KEBIJAKAN	
100	KEPALA SEKSI LEGER JALAN, PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN	ANALIS KEBIJAKAN	
101	KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG BINA MARGA		Seluruh seksi jadi JF
102	KEPALA SEKSI PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	
103	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	
104	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	
	BIDANG PENGAIRAN		Seluruh seksi jadi JF
105	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENGAIRAN	TEKNIK PENGAIRAN	
106	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	TEKNIK PENGAIRAN	
107	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGAIRAN	TEKNIK PENGAIRAN	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
108	UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH PURWAKARTA		
109	SUBBAG. TU UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH PURWAKARTA		
110	UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH PLERED		
111	SUBBAG. TU UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH PLERED		
112	UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH WANAYASA		
113	SUBBAG. TU UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH WANAYASA		
114	UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH JATILUHUR		
115	SUBBAG. TU UPTD JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH JATILUHUR		
116	UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN		
117	SUBBAG. TU UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN		
	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN		Seluruh seksi jadi JF (dikecualikan URPEM tertentu sesuai Kriteria Surat Menpan hal.18, No.10 huruf g.)
121	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	PENATA RUANG	
122	KEPALA SEKSI PERTANAHAN		
123	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	PENATA RUANG	
	BIDANG TATA BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI		Seluruh seksi jadi JF
124	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMELIHARAAN	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
125	KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
126	KEPALA SEKSI BINA KONSTRUKSI	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		Seluruh seksi jadi JF
127	KEPALA SEKSI PERUMAHAN	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
128	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
129	KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
	BIDANG PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM		Seluruh seksi jadi JF
130	KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
131	KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
132	KEPALA SEKSI REKLAME	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
133	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)		
134	Subbag. TU UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag.
135	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
136	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
137	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN		Seluruh seksi jadi JF
138	KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	PENYULUH SOSIAL	
139	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENYULUH SOSIAL	
140	KEPALA SEKSI PELINDUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	PENYULUH SOSIAL	
	BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		Seluruh seksi jadi JF
141	KEPALA SEKSI PELAYANAN DISABILITAS DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENYULUH SOSIAL	
142	KEPALA SEKSI PENANGANAN DAN PELAYANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEKERJA SOSIAL	
143	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL	PEKERJA SOSIAL	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Seluruh seksi jadi JF
144	KEPALA SEKSI KESETARAAN GENDER	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
145	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
146	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Seluruh seksi jadi JF
147	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
148	KEPALA SEKSI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
149	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA		
	SEKRETARIAT		3 Subbag. Tetap
150	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
151	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
152	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		Dari 3 jadi 2 Seksi
153	KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PROTEKSI KEBAKARAN		
154	KEPALA SEKSI MITIGASI BENCANA DAN KESIAPSIAGAAN		
155	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANALIS KEBAKARAN	
	BIDANG KEDARURATAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		3 Seksi Tetap (hal.17 No.6 huruf a. Surat MenPANRB 27 Mei 2021)
156	KEPALA SEKSI TANGGAP DARURAT DAN LOGISTIK		
157	KEPALA SEKSI REHABILITASI		
158	KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
162	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
163	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
164	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN		
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
165	UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH I		
166	SUBBAG TU UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH I		
167	UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH II		
168	SUBBAG TU UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH II		
169	UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH III		
170	SUBBAG TU UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH III		
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 1 Subbag</i>
171	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
172	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
173	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	PENGANTAR KERJA	
174	KEPALA SEKSI STANDARISASI	PENGANTAR KERJA	
175	KEPALA SEKSI BINA PRODUKTIVITAS	PENGANTAR KERJA	
	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		<i>Seluruh seksi jadi JF (dikecualikan URPEM tertentu sesuai Kriteria Surat Menpan hal.18, No.10 huruf g.)</i>
176	KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	PENGANTAR KERJA	
177	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PENGANTAR KERJA	
178	KEPALA SEKSI TRANSMIGRASI		
	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
179	KEPALA SEKSI SYARAT-SYARAT KERJA DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	
180	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	
181	KEPALA SEKSI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
182	UPTD BALAI LATIHAN KERJA		
183	SUBBAG. TU UPTD BALAI LATIHAN KERJA		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 2 Subbag</i>
184	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
185	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
186	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG TATA LINGKUNGAN		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
187	KEPALA SEKSI INVENTARISASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
188	KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
189	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
190	KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
191	KEPALA SEKSI PENANGANAN KEBERSIHAN DAN ANGKUTAN PERSAMPAHAN	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
192	KEPALA SEKSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN PENYEDOTAN TINJA	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
193	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
194	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
195	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
196	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	
197	KEPALA SEKSI PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	
198	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	
	Unit Pelaksana Teknis Daerah		
199	KEPALA UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		
200	Subbag. TU UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 2 Subbag</i>
201	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN	PERENCANA	

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
204	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
205	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		Seluruh seksi jadi JF
206	KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
207	KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEWARGANEGARAAN	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Seluruh seksi jadi JF
208	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
209	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		Seluruh seksi jadi JF
210	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
211	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 2 Subbag
212	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
213	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG PEMERINTAHAN DESA		Seluruh seksi jadi JF
214	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DESA	ANALIS KEBIJAKAN	
215	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DESA	ANALIS KEBIJAKAN	
216	KEPALA SEKSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN POTENSI DESA		Seluruh seksi jadi JF
217	KEPALA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
218	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENADAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
219	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA DESA	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA		Seluruh seksi jadi JF
220	KEPALA SEKSI LEMBAGA USAHA EKONOMI DESA	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
221	KEPALA SEKSI PEMASARAN USAHA EKONOMI DESA	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
222	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MODAL USAHA EKONOMI DESA	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 2 Subbag
223	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
224	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI		Seluruh seksi jadi JF
225	KEPALA SEKSI PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PEMETAAN PERKIRAAN PENDUDUK	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
226	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
227	KEPALA SEKSI ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	BIDANG KELUARGA BERENCANA		Seluruh seksi jadi JF
228	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
229	KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
230	KEPALA SEKSI BINA KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DAN PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT DESA	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	BIDANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA		Seluruh seksi jadi JF
231	KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA, BAWAH LIMA TAHUN, ANAK, DAN LANJUT USIA	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
232	KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
233	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
234	UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB WIL. I KELAS A		
235	SUBBAG. T. U UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WIL. I		
236	UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB WIL. II KELAS A		
237	SUBBAG. T. U UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WIL. II		
238	UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB WIL. III KELAS A		
239	SUBBAG. T. U UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WIL. III		
	DINAS PERHUBUNGAN		
	SEKRETARIAT		2 Subbag. tetap
240	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
241	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	BIDANG PRASARANA		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
245	KEPALA SEKSI TERMINAL	ANALIS KEBIJAKAN	
246	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI DANAU DAN PENYEBERANGAN		
247	KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN JALAN		
	BIDANG PENGAWASAN DAN KESELAMATAN		<i>Dari 3 jadi 2 Seksi</i>
248	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANALIS KEBIJAKAN	
249	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN		
250	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN		
	Unit Pelaksana Teknis Daerah		
251	1) UPTD Perparkiran		
252	Subbag. TU UPTD Perparkiran		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 1 Subbag</i>
253	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
254	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
255	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
256	KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
257	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
258	KEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
	BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
259	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR INFORMATIKA	PRANATA KOMPUTER	
260	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMATIKA	PRANATA KOMPUTER	
261	KEPALA SEKSI KEAMANAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	MANGGALA INFORMATIKA	
	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
262	KEPALA SEKSI APLIKASI TELEMATIKA	PRANATA KOMPUTER	
263	KEPALA SEKSI INTEGRASI APLIKASI	PRANATA KOMPUTER	
264	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI	PRANATA KOMPUTER	
	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN		<i>Seluruh seksi jadi JF (dikecualikan URPEM tertentu sesuai Kriteria Surat Menpan hal.18, No.10 huruf g.)</i>
265	KEPALA SEKSI STATISTIK		
266	KEPALA SEKSI PERSANDIAN		
267	UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi		
268	Subbag. TU UPTD LPPL Radio dan Televisi		
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	SEKRETARIAT		<i>Dari 3 jadi 2 Subbag</i>
269	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
270	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
271	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG KOPERASI		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
272	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI	PENGAWAS KOPERASI	
273	KEPALA SEKSI BINA USAHA KOPERASI	PENGAWAS KOPERASI	
274	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	PENGAWAS KOPERASI	
	BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
275	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANALIS KEBIJAKAN	
276	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANALIS KEBIJAKAN	
277	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN PROMOSI USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG PERDAGANGAN		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
278	KEPALA SEKSI BINA USAHA, SARANA DAN PRASARANA	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
279	KEPALA SEKSI PENGADAAN, PENYALURAN DAN PROMOSI	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
280	KEPALA SEKSI PENGAWASAN TERTIB NIAGA	PENGAWAS PERDAGANGAN	
	BIDANG PERINDUSTRIAN		<i>Seluruh seksi jadi JF</i>
281	KEPALA SEKSI INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
282	KEPALA SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRO DAN ANEKA	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
283	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PROMOSI DAN KERJASAMA INDUSTRI	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
284	UPTD PASAR JUMA'AH DAN PASAR KI SUNDA LEUWIPANJANG		
285	SUBBAG. TU UPTD PASAR JUMA'AH DAN PASAR KI SUNDA LEUWIPANJANG		
286	UPTD PASAR SIMPANG DAN PASAR WANAYASA		
287	SUBBAG. TU UPTD PASAR SIMPANG PASAR DAN PASAR WANAYASA		
288	UPTD PASAR CITEKO PLERED		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag
293	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
294	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
295	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL		Seluruh seksi jadi JF
296	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	ANALIS KEBIJAKAN	
297	KEPALA SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL	ANALIS KEBIJAKAN	
298	KEPALA SEKSI FASILITAS PENANAMAN MODAL	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Seluruh seksi jadi JF
299	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I	ANALIS KEBIJAKAN	
300	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II	ANALIS KEBIJAKAN	
301	KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG PENGENDALIAN		Seluruh seksi jadi JF
302	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	ANALIS KEBIJAKAN	
303	KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERIZINAN	ANALIS KEBIJAKAN	
304	KEPALA SEKSI PENGADUAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI		Seluruh seksi jadi JF
305	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANALIS KEBIJAKAN	
306	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI	ANALIS KEBIJAKAN	
307	KEPALA SEKSI REGULASI	ANALIS KEBIJAKAN	
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag
308	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
309	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
310	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG KEPEMUDAAN		Seluruh seksi jadi JF
311	KEPALA SEKSI BINA KEWIRUSAHAAN PEMUDA	PENYULUH SOSIAL	
312	KEPALA SEKSI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	PRANATA HUMAS	
313	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG OLAH RAGA		Seluruh seksi jadi JF
314	KEPALA SEKSI PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI DAN TENAGA KEOLAH RAGAAN	ANALIS KEBIJAKAN	
315	KEPALA SEKSI PEMBINAAN OLAH RAGA MASYARAKAT	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
316	KEPALA SEKSI PEMBINAAN OLAH RAGA PELAJAR	ANALIS KEBIJAKAN	
	BIDANG PARIWISATA		Seluruh seksi jadi JF
317	KEPALA SEKSI DESTINASI PARIWISATA	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	
318	KEPALA SEKSI PEMASARAN PARIWISATA	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	
319	KEPALA SEKSI INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	
	BIDANG KEBUDAYAAN		Seluruh seksi jadi JF
320	KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMESEUMAN	ANALIS KEBIJAKAN	
321	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA	PAMONG BUDAYA	
322	KEPALA SEKSI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	PAMONG BUDAYA	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag
323	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
324	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
325	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PEMBINAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN		Seluruh seksi jadi JF
326	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN	ARSIPARIS	
327	KEPALA SEKSI PELESTARIAN KEARSIPAN	ARSIPARIS	
328	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEARSIPAN	ARSIPARIS	
	BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN KEARSIPAN		Seluruh seksi jadi JF
329	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEARSIPAN	ARSIPARIS	
330	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN LAYANAN KEARSIPAN	ARSIPARIS	
331	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN KEARSIPAN	ARSIPARIS	
	BIDANG LAYANAN DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN		Seluruh seksi jadi JF
332	KEPALA SEKSI LAYANAN PERPUSTAKAAN	PUSTAKAWAN	
333	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING	PUSTAKAWAN	
334	KEPALA SEKSI OTOMASI PERPUSTAKAAN	PUSTAKAWAN	
	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN PERPUSTAKAAN		Seluruh seksi jadi JF
335	KEPALA SEKSI DEPOSIT	PUSTAKAWAN	
336	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA	PUSTAKAWAN	
337	KEPALA SEKSI PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	PUSTAKAWAN	
338	UPTD Diorama Kearsipan Kelas B		
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
342	KEPALA SEKSI BUDIDAYA TANAMAN SEREALIA	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
343	KEPALA SEKSI BUDIDAYA TANAMAN ANEKA KACANG DAN UBI	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
344	KEPALA SEKSI PASCA PANEN TANAMAN PANGAN	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	
	BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA		Seluruh seksi jadi JF
345	KEPALA SEKSI BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
346	KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN SUMBER DAYA PERKEBUNAN	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	
347	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN USAHA PERKEBUNAN	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	
	BIDANG SUMBER DAYA PERTANIAN		Seluruh seksi jadi JF
348	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	PENGAWAS ALAT MESIN PERTANIAN	
349	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	
350	KEPALA SEKSI PENYULUHAN	PENYULUH PERTANIAN	
	BIDANG KETAHANAN PANGAN		Seluruh seksi jadi JF
351	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
352	KEPALA SEKSI HARGA DAN KERAWANAN PANGAN	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
353	KEPALA SEKSI KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	ANALIS KETAHANAN PANGAN	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
354	UPTD CADANGAN PANGAN DAERAH		
355	UPTD BALAI ALAT MESIN, BINA USAHA DAN PEMBIAYAAN		
356	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN		
357	SUBBAG. TU UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN		
358	UPTD BALAI BENIH		
359	SUBBAG. TU UPTD BALAI BENIH		
	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 1 Subbag
360	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PERENCANA	
361	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
362	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PERIKANAN TANGKAP		Seluruh seksi jadi JF
363	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	PENGAWAS PERIKANAN	
364	KEPALA SEKSI KEMITRAAN USAHA NELAYAN KECIL	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	
365	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	
	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA		Seluruh seksi jadi JF
366	KEPALA SEKSI PRODUKSI	PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	
367	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN USAHA	PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	
368	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	
	BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Seluruh seksi jadi JF
369	KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	PENYULUH PERTANIAN	
370	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	MEDIK VETERINER	
371	KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENYULUH PERTANIAN	
	BIDANG PETERNAKAN		Seluruh seksi jadi JF
372	KEPALA SEKSI PEMBIBITAN	PENGAWAS BIBIT TERNAK	
373	KEPALA SEKSI SARANA, PRASARANA DAN PAKAN TERNAK	PENGAWAS MUTU PAKAN	
374	KEPALA SEKSI BINA USAHA PETERNAKAN	PENYULUH PERTANIAN	
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH		
375	UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)		
376	SUBBAG. TU UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)		
377	UPTD RUMAH POTONG HEWAN		
378	SUBBAG. TU UPTD RUMAH POTONG HEWAN		
379	UPTD PASAR HEWAN		
380	SUBBAG. TU UPTD PASAR HEWAN		
381	UPTD PERIKANAN PERAIRAN UMUM		
382	SUBBAG. TU UPTD PERIKANAN PERAIRAN UMUM		
383	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK HASIL PERIKANAN		
384	SUBBAG. TU UPTD PENGEMBANGAN PRODUK HASIL PERIKANAN		
385	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN		
386	SUBBAG. TU UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	SEKRETARIAT		Dari 3 jadi 2 Subbag
387	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM	PERENCANA	
388	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
389	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH		Seluruh seksi jadi JF
390	KEPALA SUBBIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERENCANA	

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
394	KEPALA SUBBIDANG PARIWISATA, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	PERENCANA	
395	KEPALA SUBBIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN INVESTASI	PERENCANA	
	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Seluruh seksi jadi JF
396	KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN	PERENCANA	
397	KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	PERENCANA	
398	KEPALA SUBBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERENCANA	
	BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Seluruh seksi jadi JF
399	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN	PERENCANA	
400	KEPALA SUBBIDANG PEMBIAYAAN	PERENCANA	
401	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	PERENCANA	
	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN		Seluruh seksi jadi JF
402	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN	PENELITI	
403	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	ANALIS KEBIJAKAN	
404	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	ANALIS KEBIJAKAN	
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	SEKRETARIAT		Dari 2 jadi 1 Subbag
405	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
406	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG ANGGARAN		Dari 3 jadi 2 Subbid.
407	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN		
408	KEPALA SUBBIDANG PENETAPAN ANGGARAN		
409	KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
	BIDANG PERBENDAHARAAN, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI		Dari 3 jadi 2 Subbid.
410	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN		
411	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
412	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI		
	BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH		Dari 3 jadi 2 Subbid.
413	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN ASET		
414	KEPALA SUBBIDANG PENCATATAN DAN MUTASI		
415	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMELIHARAAN ASET	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	SEKRETARIAT		Dari 2 jadi 1 Subbag
416	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
417	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN		Dari 3 jadi 2 Subbid.
418	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN DAN KONSULTASI	ANALIS KEBIJAKAN	
419	KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN, PENILAIAN PBB P2 DAN BPHTB		
420	KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA		
	BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN		Dari 3 jadi 2 Subbid.
421	KEPALA SUBBIDANG PENETAPAN DAN VERIFIKASI		
422	KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA	ANALIS KEBIJAKAN	
423	KEPALA SUBBIDANG ANALISA DAN PENGEMBANGAN		
	BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN		Dari 3 jadi 2 Subbid.
424	KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN		
425	KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN KEBERATAN	ANALIS KEBIJAKAN	
426	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	SEKRETARIAT		2 Subbag, tetap
427	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
428	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG PENGADAAN		Seluruh subbag, jadi JF
429	KEPALA SUBBIDANG FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	ANALIS SDM APARATUR	
430	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	ANALIS SDM APARATUR	
431	KEPALA SUBBIDANG PENEMPATAN DAN KEPANGKATAN	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Seluruh subbag, jadi JF
432	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	ANALIS SDM APARATUR	
433	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN JABATAN STRUKTURAL	ANALIS SDM APARATUR	
434	KEPALA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANALIS SDM APARATUR	
	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN		Seluruh subbag, jadi JF
435	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI	ANALIS SDM APARATUR	
436	KEPALA SUBBIDANG KESEJAHTERAAN	ANALIS SDM APARATUR	
437	KEPALA SUBBIDANG PEMENSIUNAN	ANALIS SDM APARATUR	
	RSUD BAYU ASIH		
	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN		
	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS		
	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN		
	KEPALA BIDANG PENUNJANG		
	WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
440	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
441	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUKUM		
442	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	ANALIS SDM APARATUR	
443	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	ANALIS KEBIJAKAN	
444	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN HUMAS	PRANATA HUMAS	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	SEKRETARIAT		
445	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN		3 Subbag. Tetap
446	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN		
447	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
	BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH		
448	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN		2 Seksi. Tetap
449	KEPALA SEKSI PENYELUDIKAN DAN PENYIDIKAN		
	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT		
450	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN		2 Seksi. Tetap
451	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PENCEGAHAN		
	BIDANG SUMBERDAYA APARATUR		
452	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		2 Seksi. Tetap
453	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERSONIL		
	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
454	KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 Seksi. Tetap
455	KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT		
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Ketentuan khusus Hal.17 No.7,huruf a). Surat MenPANRB 27 Mei 2021
456	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA		
457	KEPALA SEKSI KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA		
458	KEPALA SEKSI POLITIK DALAM NEGERI		
	CAMAT PURWAKARTA		
	SEKRETARIS CAMAT		
459	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
460	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
461	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
462	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
463	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
464	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
465	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT BUNGURSARI		
	SEKRETARIS CAMAT		
466	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
467	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
468	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
469	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
470	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
471	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
472	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT CAMPAKA		
	SEKRETARIS CAMAT		
473	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
474	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
475	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
476	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
477	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
478	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
479	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT CIBATU		
	SEKRETARIS CAMAT		
480	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
481	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
482	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
483	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
484	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
485	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
486	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT KIARAPEDES		
	SEKRETARIS CAMAT		
487	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
488	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
489	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
490	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
491	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
492	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
495	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
496	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
497	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
498	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
499	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
500	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT WANAYASA		
	SEKRETARIS CAMAT		
501	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
502	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
503	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
504	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
505	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
506	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
507	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT BOJONG		
	SEKRETARIS CAMAT		
508	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
509	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
510	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
511	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
512	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
513	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
514	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT DARANGDAN		
	SEKRETARIS CAMAT		
515	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
516	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
517	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
518	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
519	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
520	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
521	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT SUKATANI		
	SEKRETARIS CAMAT		
522	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
523	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
524	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
525	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
526	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
527	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
528	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT TEGAL WARU		
	SEKRETARIS CAMAT		
529	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
530	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
531	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
532	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
533	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
534	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
535	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT MANIIS		
	SEKRETARIS CAMAT		
536	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
537	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
538	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
539	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
540	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
541	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
542	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT SUKASARI		
	SEKRETARIS CAMAT		
543	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
544	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
545	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
546	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
547	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
548	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
549	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT SUKASARI		
	SEKRETARIS CAMAT		
550	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
551	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
552	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
556	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT PLERED		
	SEKRETARIS CAMAT		
557	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
558	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
559	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
560	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
561	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
562	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
563	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT PASAWAHAN		
	SEKRETARIS CAMAT		
564	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
565	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		
566	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
567	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
568	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
569	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
570	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	CAMAT BABAKAN CIKAO		
	SEKRETARIS CAMAT		
571	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
572	Subbagian Kepegawaian dan Umum		
573	Seksi Tata Pemerintahan		
574	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
575	Seksi Ekonomi dan Pembangunan		
576	Seksi Kesejahteraan Sosial		
577	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	KELURAHAN NAGRIKIDUL		
578	LURAH		
579	SEKRETARIS		
580	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
581	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
582	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN SINDANGKASIH		
583	LURAH		
584	SEKRETARIS		
585	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
586	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
587	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN CIPAISAN		
588	LURAH		
589	SEKRETARIS		
590	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
591	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
592	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN NAGRI TENGAH		
593	LURAH		
594	SEKRETARIS		
595	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
596	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
597	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN NAGRI KALER		
598	LURAH		
599	SEKRETARIS		
600	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
601	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
602	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN TEGAL MUNJUL		
603	LURAH		
604	SEKRETARIS		
605	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
606	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
607	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN MUNJUL JAYA		
608	LURAH		
609	SEKRETARIS		

NO	PENGAWAS	FUNGSIONAL	KETERANGAN
	KELURAHAN CISEUREUH		
613	LURAH		
614	SEKRETARIS		
615	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
616	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
617	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	KELURAHAN PURWAKARTA		
618	LURAH		
619	SEKRETARIS		
620	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		
621	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
622	SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TOTAL JAB. ESS. IV	JUMLAH JAB. YG DIALIHKAN	JUMLAH YG DIKECUAL IKAN	KETERANGAN
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	0	3	Ketentuan khusus Hal.17 No.7.huruf a). Surat MenPANRB 27 Mei 2021
26	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENCAIRAN	21	9	12	Dikecualikan 12 Kasubag pada Sekretariat
27	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	17	12	5	Dikecualikan 2 kasubag pada Sekretariat dan Pada UPTD
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	0	11	Dikecualikan pada 3 Kasubag Pada Sekretariat dan 2 Kasi pada masing-masing Bidang
29	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	21	3	18	3 Seksi Tetap (hal.17.No.6 huruf a Surat MenPANRB 27 Mei 2021)
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16	11	5	Dikecualikan 1 Kasubag pada Sekretariat dan pada UPTD serta Seluruh seksi jadi JF (dikecualikan URPEM tertentu sesuai Kriteria Surat Menpan hal.18.No.10 huruf g.)
	JUMLAH TOTAL	622	273	349	



 PURWAKARTA,

 ANGG RATNA MUSTIKA